



Dampak *European Green Deal* terhadap Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan di Eropa

Safira Nadhila Firdhausa

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM. 10, Tamalanrea Indah, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: safiranadhilafirdhausa@gmail.com

Abstract. *The European Green Deal is the European Union's strategy to reduce the impact of climate change and carry out major reforms in the agricultural sector. However, small and medium-sized farmers are suffering losses due to shift to more environmentally friendly agricultural system, stricter regulations, reduced subsidies, and restrictions on chemical fertilizers. In this journal, it can be seen how EGD policies create economic and social vulnerabilities that could threaten food security and the internal stability of the European Union. The methods used are a qualitative approach and descriptive analysis of the impact of green deal policies, which affect farmers and the general public. Data collection was conducted through a literature review of previous studies related to the impacts of the Green Deal. This journal discusses four key areas, the transformation of Green Deal policies, economic vulnerabilities faced by farmers, emerging social-political resistance, and implications for non-traditional security. The research indicates that while EGD policies aim to address climate threats, their implementation has led to non-security issues. A balance between climate and long-term food security is needed. To address social and economic changes at the domestic and regional levels, this study emphasizes the importance of inclusive and adaptive green transition policies.*

Keywords: *Common agricultural policy, Environmental policy, European green deal, Farmer welfare, Food security*

Abstrak. Kesepakatan Hijau Eropa adalah sebuah strategi dari Uni Eropa dalam mengurangi perubahan iklim dan melakukan reformasi secara besar-besaran di sektor pertanian. Namun petani kecil dan menengah telah mengalami kerugian sebagai akibat dari pergeseran ke sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, terlibat dalam regulasi ketat, pengurangan subsidi, dan pembatasan pupuk kimia. Dalam artikel jurnal ini, dapat terlihat bagaimana kebijakan EGD menimbulkan kerentanan ekonomi dan sosial yang baru dapat mengancam ketahanan dari pangan serta stabilitas internal Uni Eropa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggunakan analisis deskriptif terhadap dampak kebijakan kesepakatan hijau yang memberikan dampak terhadap petani dan masyarakat umum. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dampak dari kesepakatan hijau. Artikel jurnal ini membahas empat hal utama, yaitu transformasi dari kesepakatan hijau, dampak ekonomi terhadap para petani, resistensi sosial-politik yang muncul, dan dengan adanya implikasi terhadap keamanan non-tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan EGD berusaha menanggapi ancaman iklim, penerapan mereka menimbulkan permasalahan keamanan yang terjadi secara tidak biasa. Dibutuhkan sebuah keseimbangan antara keseimbangan iklim dan ketahanan pangan jangka panjang di Eropa. Untuk menanggapi perubahan sosial dan ekonomi di tingkat domestik serta regional, penelitian ini menekankan pada betapa pentingnya kebijakan transisi hijau yang inklusif dan adaptif

Kata kunci: Kebijakan lingkungan, Kebijakan pertanian bersama, Kesejahteraan petani, Kesepakatan hijau Eropa, Ketahanan pangan

1. LATAR BELAKANG

European Green Deal adalah sebuah respon dari Uni Eropa untuk mengurangi dampak negatif dari berbagai aktivitas manusia terhadap lingkungan dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Dengan EGD memiliki tujuan utama berupa menempatkan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia di pusat kebijakan ekonomi dan sebagai elemen penting dalam semua

keputusan kebijakan dan tindakan yang dihasilkan. EGD dilakukan untuk mendorong adanya transisi secara bersama pada ekonomi netral karbon dan untuk mengurangi emisi karbon sekitar 50-55% dibandingkan pada tahun 1990 hingga mencapai tujuan netralitas karbon pada tahun 2050. Untuk mencapai netralitas karbon, semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor seperti, konstruksi, keanekaragaman hayati, transportasi, pertanian, dan makanan harus ikut serta berpartisipasi (Szpilko & Ejdys, 2022) .

Oleh karena itu, dengan menggunakan konsep reorientasi kegiatan Uni Eropa ke arah lingkungan, Komisi Eropa membentuk program kerjanya pada bidang-bidang yang merupakan tindakan utama dari komunikasi EGD, seperti pada masalah iklim, energi bersih terjangkau dan aman, strategi industri untuk ekonomi bersih dan sirkular, mobilitas berkelanjutan dan cerdas, pertanian dan perikanan, biodiversitas, nol polusi dan lingkungan bebas racun, arus utama berkelanjutan, perdagangan dan kebijakan luar negeri, serta Pakta Iklim Eropa (Sikora, 2021).

Dalam EGD, terdapat strategi Farm to Fork (F2F) yang memiliki tujuan bahwa beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, akuakultur, dan rantai pangan memberikan kontribusi yang signifikan. EGD menyatakan bahwa untuk mengatasi krisis iklim dan keanekaragaman hayati, maka beberapa aktivitas harus mengalami perubahan strategis. Diperkirakan terdapat perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya yang lebih luas, termasuk pangan serta pertanian. Hal ini mencakup untuk mengurangi intensitas dari beberapa sistem produksinya. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian yang merupakan sektor kedua tertinggi penyumbang emisi gas rumah kaca di Uni Eropa sebesar 11%. Dengan pengadaan transformasi pada sektor pertanian dapat membawa ke pertanian secara berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dapat memberikan kontribusi besar untuk mencapai Green Deal (Boix-Fayos & de Vente, 2023).

F2F mendorong adanya transisi menuju sistem pangan berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pestisida dan antimikroba, mengurangi kehilangan gizi, mengurangi kehilangan nutrisi, mempromosikan pertanian organik, meningkatkan kesejahteraan hewan, membalikkan tren obesitas, mengurangi limbah makanan, dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan yang telah ditetapkan oleh F2F harus dapat dicapai termasuk melalui reformasi dari kebijakan yang telah ada, yaitu Common Agricultural Policy (CAP) Uni Eropa (Bazzan et al., 2023) .

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan memicu serangkaian gelombang protes dari pihak para petani di berbagai negara Uni Eropa. Beberapa kebijakan dianggap membawa kerugian bagi para petani. Misalnya, terdapat pada Common Agricultural Policy (CAP) Uni

Eropa yang berisi kebijakan lingkungan yang lebih tepat bagi para petani. Kebijakannya mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan mengurangi dari penggunaan pupuk kimia serta pestisida. Hal ini ditolak oleh para petani karena mereka berpendapat hal ini dapat meningkatkan harga produksi dan mengurangi kemampuan daya saing mereka. Selain itu, pengurangan subsidi pertanian berdampak pada stabilitas keuangan pertanian (Putri, 2025).

Gangguan ekonomi yang dihadapi oleh petani dapat berdampak luas terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian di daerah pedesaan. Adanya penurunan produktivitas dan keuntungan yang didapat para petani dapat berdampak pada penurunan dari produksi pangan. Hal ini tentu dapat mengancam harga dan ketersediaan pangan, yang tentu akan dapat mengancam ketahanan pangan terutama bagi populasi rentan (Putri, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Human Security

Sebelum masa perang dingin, definisi *human security* atau keamanan manusia hanya mencakup konflik, militer, dan pertahanan territorial. Aman didefinisikan sebagai suatu situasi ketika tidak ada ancaman, konflik, atau perang. Namun hal tersebut berubah pasca perang dingin, terdapat pergeseran makna dari *human security*. Aman juga melibatkan masalah kemanusiaan, seperti kelaparan, pemanasan global, perdagangan manusia, kemiskinan, terorisme, penyebaran penyakit, dan sebagainya yang menjadi definisi dari *human security* yang dikenal saat ini (Mumtazinur & Wahyuni, 2021).

Konsep keamanan mencakup semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, bukan hanya ancaman, konflik, ataupun perang. Terdapat banyak jenis kebutuhan manusia, termasuk rasa aman, tempat tinggal, kesehatan, makanan, lingkungan yang sejuk, serta kebutuhan manusia lainnya. Perubahan dalam terminologi maupun indikator keamanan menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah perang dingin menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan telah lama diprioritaskan (Mumtazinur & Wahyuni, 2021).

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah melakukan pengembangan konsep dari *human security* menjadi konsep yang lebih luas. Gagasan akan konsep *human security* bukan saja berdasarkan konsep keamanan saja. Hal ini dikarenakan individu merupakan pusat dari security concern dan penanganan *human security* memiliki makna bahwa menangani adanya kemungkinan dari penyebab serta solusi untuk permasalahan keamanan (de Paulo Gewehr & de Andrade Guerra, 2022).

Makna *human security* dapat diartikan negatif dengan tidak adanya ancaman pada suatu nilai dari inti manusia tercakup pada suatu yang paling dasar dari nilai manusia yaitu sebuah

tataran dari psikologis manusia (Mumtazinur & Wahyuni, 2021). Namun, *human security* dapat diartikan pula secara positif yaitu menjaga sebuah nilai esensial manusia dari ancaman bersifat kritis dan menyeluruh. Dengan pengertian bahwa adanya penyeruan pembaruan keamanan dengan memprioritaskan individu sebagai bagian dari objek utama referensi keamanan. Nilai vital yang merujuk pada komponen-komponen penting dalam kehidupan manusia, seperti martabat dasar, mata pencaharian, dan keberlangsungan hidup (Jyalita, 2023).

Dalam *The Human Development Report* oleh UNDP tahun 1994, *human security* terbagi menjadi tujuh kategori, meliputi keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, keamanan makanan, keamanan komunitas, dan keamanan personal (de Paulo Gewehr & de Andrade Guerra, 2022). Saat ini, konsep ancaman terhadap *human security* telah berubah dari yang bersifat tradisional menjadi ke sifat non-tradisional. Jenis ancaman non-tradisional berfokus pada manusia atau individu sebagai objek utama seperti pada perdagangan manusia, wabah penyakit, kemiskinan, KDRT, dan sebagainya. Sementara pada ancaman tradisional berfokus pada ancaman pada negara berupa militer, perang, dan hal lain yang membutuhkan kekuatan militer untuk menyelesaikannya (Mumtazinur & Wahyuni, 2021).

Food Security

Pangan merupakan hal penting dalam kesejahteraan manusia. Tanpa adanya akses yang memadai terhadap pangan secara aman, terjangkau, dan bergizi maka kesejahteraan individu dapat terancam. Hal ini dapat berdampak pada memburuknya kesehatan hingga kematian. Maka *food security* atau ketahanan pangan menjadi komponen penting dalam menjamin dari *human security*. *Food security* atau ketahanan pangan didefinisikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) ketika semua orang dapat mengakses secara fisik, ekonomi, dan sosial terhadap makanan secara cukup, aman serta bergizi. Dimana makanan tersebut memungkinkan mereka dapat hidup secara aktif dan sehat (Asaka & Oluoko-Odingo, 2022).

Definisi tersebut mencakup pada empat poin dari *food security*, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Ketersediaan pangan itu merujuk pada jumlah dan kualitas dari produksi serta pasokan makanan yang dapat diimpor atau dibuat di dalam negeri. Aksesibilitas pangan mengacu pada kemampuan dalam memperoleh makanan baik secara fisik atau ekonomi. Pemanfaatan pangan itu merujuk apakah makanan yang dikonsumsi bersih dan mengandung nilai gizi yang cukup. Terakhir, stabilitas pangan merujuk pada bagaimana makanan tersebut dapat bertahan dari gangguan bencana baik dari buatan manusia dan bencana alam (Jyalita, 2023).



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif untuk memahami dampak kebijakan green deal terutama pada para petani serta masyarakat secara umum. Serta dengan menggunakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dampak dari green deal. Metode pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih baik tentang fenomena subjek penelitian, diantara lain baik secara tindakan, persepsi, motivasi, perilaku, dan lain sebagainya. Pendekatan dilakukan secara keseluruhan dan terang-terangan dengan memakai beberapa metode ilmiah (Cibadak, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi dari European green deal

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai green deal adalah penggunaan strategi farm to fork (F2F) yang berusaha mendorong pergeseran ke metode pertanian yang lebih ramah lingkungan dengan mempertimbangkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida, antimikroba, pupuk, meningkatkan pertanian organik, meningkatkan kesejahteraan hewan, dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati. Strategi ini mengusulkan mencapai setidaknya 25% pertanian organik di Eropa, mengurangi penggunaan pestisida hingga 50%, dan penggunaan pupuk hingga 20% beserta dilakukan dalam tempo satu decade (Boix-Fayos & de Vente, 2023).

Terdapat empat jalur atau alat transisi utama yang digunakan F2F dalam mencapai tujuannya. Pertama berupa perubahan aturan seperti penggunaan pestisida berkelanjutan. Kedua adalah pengawasan undang-undang lingkungan dan iklim yang relevan, seperti mengontrol penggunaan pupuk. Ketiga adalah pembuatan rencana aksi khusus, seperti

pengelolaan nutrisi terpadu dan pertanian organik. Keempat adalah melakukan adaptasi terhadap Common Agricultural Policy (CAP) yang baru dengan tujuan green deal. Hal ini berarti memasukkan langkah-langkah yang ditargetkan dalam rencana strategis nasional CAP (Boix-Fayos & de Vente, 2023).

CAP merupakan alat penting untuk menghubungkan tujuan strategis F2F dengan tindakan oleh petani dan pengelolaan lahan. CAP akan berfokus pada sepuluh tujuan yang terkait green deal dan tujuan keberlanjutan Uni Eropa di bidang pertanian serta daerah pedesaan. CAP memiliki tujuan untuk memberdayakan petani Eropa agar dapat berkontribusi lebih tegas dalam mengatasi perubahan iklim, melindungi lingkungan, dan beralih ke sistem pangan secara berkelanjutan (Boix-Fayos & de Vente, 2023).

CAP akan dilaksanakan di tingkat nasional dengan rencana strategis nasional dan alat-alat yang berfokus untuk mencapai tujuan lingkungan serta iklim yang memberikan kontribusi pada green deal Eropa. 40% anggaran CAP akan relevan dengan isu iklim. CAP didasarkan pada “green architecture” dimana semua dari penerima manfaat CAP akan memiliki pembayaran yang dikaitkan dengan aturan wajib dan persyaratan manajemen. Petani yang menerima dukungan CAP diharapkan dapat mematuhi Good Agricultural and Environmental Condition (GAECs) (Boix-Fayos & de Vente, 2023).

Reformasi dari CAP mendorong adopsi penelitian dan inovasi dari para petani. CAP juga serta menyampaikan informasi teknologi dan ilmiah terkini untuk memberikan nasihat kepada para petani. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi secara substansial terhadap target F2F, jika rencana strategis negara anggota mencerminkan target-target ini. Selain tujuan lingkungan, reformasi CAP memiliki tujuan untuk memberikan distribusi dukungan pendapatan yang lebih baik dengan menetapkan maksimum €100.000 setiap tahun subsidi per penerima manfaat (Boix-Fayos & de Vente, 2023).

Kerentanan terhadap ekonomi petani

Adanya peningkatan regulasi pertanian yang baru dapat berdampak secara ekonomi terhadap para petani. Dengan adanya peningkatan regulasi pertanian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghentikan kemajuan green technology. Hal ini juga berdampak terhadap para petani yang memungkinkan mereka untuk menghadapi biaya tambahan dalam beradaptasi dengan kebijakan baru. Peningkatan biaya tersebut berdampak merusak profitabilitas dan stabilitas finansial mereka (Putri, 2025).

Reformasi dari kebijakan CAP yang memperketat persyaratan lingkungan terhadap para petani, seperti mengadopsi dari praktik pertanian secara berkelanjutan dan mengurangi penggunaan pupuk kimia serta pestisida tidak memberikan hasil yang baik kepada para petani.

Hal ini berdampak pada kenaikan biaya berbagai produk yang meningkatkan biaya produksi itu sendiri. Kenaikan biaya ini berdampak pada bertambahnya tekanan finansial secara signifikan yang menyebabkan para petani untuk beroperasi dengan mendapatkan keuntungan marginal yang kecil (Putri, 2025).

Pemerintah dalam upayanya mereformasi CAP agar sejalan dengan tujuan lingkungan secara berkelanjutan membutuhkan biaya finansial yang tinggi. Hal ini berdampak pada menurunnya dukungan finansial terhadap petani menurun, berupa pengurangan jumlah subsidi terhadap para petani. Pengurangan jumlah subsidi menyulitkan para petani dalam beroperasi dan mengganggu stabilitas keuangan mereka (Putri, 2025).

Resistensi secara sosial dan politik

Pada tahun 2023-2024 terdapat serangkaian protes oleh para petani di berbagai negara, seperti Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, Spanyol dan Polandia. Protes yang terjadi terutama kepada CAP yang dianggap tidak memihak kesejahteraan petani. CAP dianggap terlalu berfokus sebagai bentuk perlawanan terhadap isu iklim dibandingkan dengan kesejahteraan petani (Finger et al., 2024).

Impor pertanian dari luar Uni Eropa terutama dari Ukraina menjadi salah satu agenda protes dari para petani. Mereka menganggap impor yang terjadi dapat menciptakan persaingan pasar yang tidak sehat dan berpotensi untuk menjatuhkan harga dari hasil produksi para petani lokal. Negara di luar Uni Eropa tidak mengikuti regulasi CAP terbaru yang memberatkan para petani sehingga mereka dapat menjual hasil produksi dengan harga yang lebih murah. Maka mereka melakukan protes agar diadakan pembatasan mengenai produk pertanian non-Uni Eropa, terkhususnya dari Ukraina (Finger et al., 2024).

Beberapa gelombang protes yang terjadi salah satunya di Belanda memprotes kebijakan yang mengurangi emisi nitrogen dan pengurangan jumlah ternak hingga sepertiga. Protes yang dilakukan menggunakan traktor-traktor besar untuk memblokir jalan. Protes yang dilakukan berujung pada pembentukan partai sayap kanan yang berorientasi pada pertanian, yaitu Partai *BoerBurgerBeweging* (BBB). Protes petani di Jerman yang dipicu oleh adanya usulan oleh Pemerintah Federal dalam menghapuskan keringanan pajak pada solar pertanian. Protes yang dilakukan di Spanyol didasarkan oleh pembatasan penggunaan air yang diakibatkan oleh kekeringan. Sementara protes di Perancis dilakukan karena tidak puas dengan harga pasar (Matthews, 2024).



Gambar 1. Protes Para Petani di Belanda

Sumber : Foto oleh Robin van Lonkhuijsen / The Guardian (2023)

Dapat terlihat dengan banyak protes yang dilakukan oleh para petani menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap kebijakan lingkungan yang ada. Mereka merasa kebijakan tersebut terlalu ketat dan meningkatkan beban terhadap ekonomi mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh partai sayap kanan untuk menaikkan dukungan dari kalangan para petani. Terutama pada kalangan yang mengalami ketidakpuasan terhadap green deal. Banyak dari para petani juga merasa kebijakan Uni Eropa yang lebih memihak perusahaan besar dibandingkan memihak terhadap petani kecil. Oleh karena itu, mereka mulai mendukung partai-partai sayap kanan yang menentang terhadap integrasi Eropa. Hal ini sejalan dengan partai sayap kanan yang skeptis akan kebijakan lingkungan dan anti terhadap integrasi Eropa (Finger et al., 2024).

Implikasi terhadap keamanan non-tradisional

Salah satu tujuan dari green deal adalah meningkatkan pertanian organik yang ramah lingkungan serta inovatif. Keunggulan unik dari mereka adalah penggunaan Teknik produksi organik yang melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi sumber daya alam sambil memproduksi makanan berkualitas tinggi dengan menggunakan metode produksi pertanian yang memenuhi kebutuhan tanah, tanaman, serta hewan. Dengan demikian, pertanian ini membantu menjaga kesuburan tanah dan melindungi lingkungan dari polusi dan kontaminasi sumber pertanian (Wrzaszcz, 2023).

Akan tetapi dalam penggunaan lahan, pertanian organik memerlukan lahan yang lebih luas serta menghasilkan produksi hasil pertanian yang lebih sedikit dibandingkan dengan pertanian konvensional (Boix-Fayos & de Vente, 2023) . Dalam pertanian organik, diberlakukan pembatasan penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia yang berdampak pada berkurangnya produksi pertanian sebesar 7-12%. Hal ini dapat berdampak pada adanya peningkatan harga makanan baik dari skala Uni Eropa hingga ke skala global (Impallomeni & Barreca, 2025). Berkurangnya produksi pertanian yang dihasilkan akan berdampak pada ketersediaan pangan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap ketahanan pangan di beberapa negara anggota Uni Eropa (Ziętara & Mirkowska, 2021). Dengan penurunan

ketersediaan pangan akan berdampak pada peningkatan harga dari beberapa produk pangan. Adanya peningkatan harga pangan akan menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses beberapa produk makanan terutama pada masyarakat berpendapatan rendah (Żuchowska-Grzywacz, 2023). Hal ini membuktikan bahwa penurunan produksi pertanian dan kenaikan harga pangan berpengaruh pada ketersediaan pangan serta aksesibilitas pangan yang merupakan bagian dari ketahanan pangan (Żuchowska-Grzywacz, 2023).

Protes yang dilakukan para petani juga berdampak besar terhadap ketahanan pangan. Sektor pertanian mengalami gangguan akibat dari protes yang terjadi. Hal ini dikarenakan para petani berjuang mempertahankan mata pencaharian mereka dan beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Pada akhirnya, hal ini dapat merusak ketahanan pangan karena kemampuan sektor pertanian untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat di seluruh dunia dapat terganggu. Selain itu, masalah ekonomi yang dihadapi oleh para petani dapat memiliki konsekuensi yang lebih luas karena penghentian mata pencaharian di desa dapat menyebabkan penurunan produktivitas petani, kehilangan komunitas pertanian tradisional, dan terkikisnya warisan budaya yang terkait dengan praktik pertanian (Putri, 2025).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji bagaimana dampak European Green Deal terutama pada para petani serta masyarakat umum. Untuk mengatasi dampak negatif manusia terhadap lingkungan yang cepat berubah, maka Uni Eropa membuat kesepakatan European Green Deal. Tujuan dari adanya EGD adalah untuk mencapai pengurangan emisi karbon bersih selama 50-55% pada tahun 2050. Hal ini akan mencakup semua bidang seperti, pertanian, produksi, transportasi konstruksi, dan ketahanan pangan.

Komisi Eropa telah melaksanakan program-program yang berfokus pada komunikasi lingkungan, perubahan iklim, konservasi energi, strategi industri untuk ekonomi berkelanjutan dan sirkular, mobilisasi sumber daya, pertanian dan kehutanan, keanekaragaman hayati, pengurangan polusi, dan perlindungan lingkungan. Farm to Fork (F2F) adalah strategi dalam EGD yang bertujuan untuk mengurangi resistensi pestisida dan antimikroba, ketahanan pangan, dan kesejahteraan hewan. F2F mendorong transformasi sektor pertanian tertentu untuk menghasilkan sistem pangan yang lebih berkelanjutan, terutama di sektor peternakan, yang merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua di Uni Eropa.

Namun dalam pelaksanaannya, dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan terdapat beberapa yang dapat menyulitkan para petani. Para petani kesulitan dalam menyesuaikan dengan sistem baik pada pengurangan pada penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia.

Para petani juga ikut turut serta dalam hal menyuarakan suaranya dalam memprotes kebijakan yang dianggap tidak memihak mereka. Hal-hal ini berdampak pada penurunan jumlah hasil produksi, ketersediaan bahan pangan, dan keterjangkauan terhadap hasil produksi yang merupakan bagian dari ketahanan pangan.

DAFTAR REFERENSI

- Bazzan, G., Daugbjerg, C., & Tosun, J. (2023). Attaining policy integration through the integration of new policy instruments: The case of the Farm to Fork Strategy. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 45(2), 803–818.
- Boix-Fayos, C., & de Vente, J. (2023). Challenges and potential pathways towards sustainable agriculture within the European Green Deal. *Agricultural Systems*, 207, 103634.
- de Paulo Gewehr, L. L., & de Andrade, J. B. S. O. (2022). Geopolitics of hunger: Geopolitics, human security and fragile states. *Geoforum*, 137, 88–93.
- Finger, R., Fabry, A., Kammer, M., Candel, J., Dalhaus, T., & Meemken, E. M. (2024). Farmer protests in Europe 2023–2024. *EuroChoices*, 23(3), 59–63.
- Impallomeni, G., & Barreca, F. (2025). Agrivoltaic systems towards the European Green Deal and agricultural policies: A review. *Journal of Agricultural Engineering*. (in press)
- Jyalita, V. V. H. (2023). The relevance of human security approach in assessing the causes and solutions to food insecurity in South Sudan (Case Study: South Sudan 2017 famine). *Jurnal Sentris*, 4(1), 73–85.
- Matthews, A. (2024). Farmer protests and the 2024 European Parliament elections. *Intereconomics*, 59(2), 83–87.
- Mumtazinur, M., & Wahyuni, Y. S. (2021). Keamanan individu (personal security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan konsep keamanan manusia (human security). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 76–89.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Harva Creative.
- Putri, N. S. (2025). Farmers' protests in Europe: Economic disruptions and agricultural sector challenges. *SUKUK: International Journal of Banking, Finance, Management and Business*, 4(1), 15–27.
- Sikora, A. (2021). European Green Deal—legal and financial challenges of the climate change. *ERA Forum*, 21, 681–697.
- Szpilko, D., & Ejdy, J. (2022). European Green Deal—research directions: A systematic literature review. *Ekonomia i Środowisko*(2), 8–38.
- Tullis, P. (2023, November 16). Nitrogen wars: The Dutch farmers' revolt that turned a nation upside-down. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/environment/2023/nov/16/nitrogen-wars-the-dutch-farmers-revolt-that-turned-a-nation-upside-down>

- Wrzaszcz, W. (2023). Tendencies and perspectives of organic farming development in the EU: The significance of European Green Deal Strategy. *European Journal of Sustainable Development*, 12(1), 143.
- Ziętara, W., & Mirkowska, Z. (2021). The Green Deal: Towards organic farming or greening of agriculture? *Zagadnienia Ekonomiki Rolnej*, 368(3), 29–54.
- Żuchowska-Grzywacz, M. M. (2023). Regulations on organic product in the European Green Deal in the context of food security. *TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, 16(1). (Pembahasan 4.4)